



Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah Banten

Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2022

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Jalan Brigjend KH. Syam'un No. 44D Serang 42112
Telp/Whatsapp: 081-1992-0254/0819-0222-2210
Laman : www.banten.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
Berprestasi Berprestasi, Berkeadilan Berkeadilan,
Berkeadilan Berkeadilan, Berkeadilan Berkeadilan



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Sebagai salah satu bagian dari Badan Publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, sebagai implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 khususnya pasal 4 huruf j, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten berupaya untuk menyusun **Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2022** sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Selaku Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar

2 Daftar Isi

3 Bab I Gambaran Umum

- 3 Regulasi
- 4 Sarana Prasarana
- 5 Inovasi
- 5 Sumber Daya Manusia

7 Bab II Laporan Pelayanan Informasi Publik

- 6 Layanan Reguler
- 7 Layanan Saluran/Media

9 Bab III Penutup

- 9 Kendala Dalam Pelaksanaan Informasi Publik
- 9 Langkah Strategis

10 Lampiran

BAB I

GAMBARAN UMUM

Saat ini fungsi Kehumasan atau Layanan Informasi Publik berada dalam kewenangan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Secara khusus, fungsi layanan tersebut berada di Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus meningkatkan kualitas di berbagai aspek Layanan Informasi Publik seperti: regulasi internal, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan inovasi-inovasi guna peningkatan Layanan Informasi Publik.

Regulasi

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi public; (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Kebijakan umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Nomor: W12-HH.01.05 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun Anggaran 2022.

Sarana Prasarana

Untuk pelayanan kedatangan langsung/tatap muka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyediakan prasarana berupa :

Sarana	Jumlah
Meja Layanan Informasi dan Pengaduan	1 unit
Kursi	3 unit
Brosur Layanan	1 pack
Banner Pelayanan Publik	4 unit
Kotak Saran	1 unit
Maklumat Pelayanan	1 unit
Panduan Alur Pelayanan Publik	2 buah
Layar Informasi Layanan Digital	1 buah
Layar Penilaian Kepuasan Masyarakat	1 buah

Selain menerima pelayanan secara langsung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi juga menerima Layanan Informasi Publik maupun Layanan Hukum dan HAM melalui media sebagai berikut :

Telepon/Whatsapp: 08081-1992-0254/ 0819-0222-2210	Surat Elektronik : kanwil.banten@kemenkumham. com
Contact us :	
Website : banten.kemenkumham.go.id Youtube Channel : Prestasi Banten TV	Instagram : humas_kumhambanten Facebook: Humas Kanwil Banten Twitter : humas_kumhambanten

Inovasi

Selain melaksanakan kerja rutin pelayanan informasi, Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten juga melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan keterjangkauan informasi kepada masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan juga dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di masyarakat sehingga informasi kinerja serta pemberian layanan Hukum dan HAM dapat tersampaikan kepada masyarakat.

1. Masyarakat mendapatkan informasi lebih lengkap dan aktual secara rutin melalui kanal **Youtube Prestasi Banten TV** yang memuat:
 - ✓ Video & Podcast Penyuluhan Hukum kepada masyarakat tentang isu-isu aktual;
 - ✓ Liputan Prestasi TV yang memuat informasi khusus tentang isu aktual pada Satker
 - ✓ Ngopi Prestasi yang memuat pengembangan kompetensi melalui podcast & Sebagai sarana berkolaborasi dengan media eksternal;
 - ✓ Video informasi terkait aplikasi Sijawara.
2. Terobosan Inovasi Layanan berbasis Teknologi Informasi
 - ✓ Melalui **JAWARA**, Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM seperti Proses Izin Tinggal, Permohonan Izin Penelitian, Konsultasi Hukum dan HAM, Kenotariatan, Harmonisasi Raperda, Partisipasi Masyarakat terhadap Raperda, dan produk hasil karya WBP tanpa perlu ke Kantor Wilayah (dapat diakses dimana saja)

Sumber Daya Manusia

Tim Humas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang bertanggung jawab pada Pelayanan Informasi Publik berada pada Bagian Program dan Humas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan 7 (tujuh) orang fungsional umum.

BAB II

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Reguler


Sepanjang **Triwulan II (April - Juni) Tahun 2022**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menerima permohonan Layanan Informasi terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, diantaranya Layanan Informasi Administrasi, Layanan Informasi Keimigrasian, Layanan Informasi Pemasarakatan dan Layanan Informasi Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:



Layanan Saluran/Media




Selain melalui layanan regular/tatap muka, sepanjang Triwulan II Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerima permohonan Layanan Informasi, Aspirasi maupun Pengaduan yang disampaikan melalui layanan saluran/media lainnya diantaranya telepon, Chat Whatsapp, Social Media (*Direct Message Instagram*), Surat Elektronik, dan lainnya. Kegiatan layanan informasi melalui media ini dikelola oleh staf/pegawai pada Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi yang bertugas sebagai admin dari seluruh sosial media Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.



 **Prestasi Banten TV**
567 subscribers

HOME VIDEOS PLAYLISTS CHANNELS A

▶ PLAY ALL

 <p>DAPUR TERBAIK PENYEDIA BAMA 6:14</p>	 <p>JINGLE WBK KANWIL KUMHAM BANTEN 3:00</p>	 <p>KOMITMEN WBK KANWIL BANTEN 1:</p>
RESTASI	JINGLE PEMBANGUNAN	KANWIL KEMENTERIAN

 **KANTOR WILAYAH BANTEN**
DEWANTERAN KESEHATAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

 **PODCAST
JAWARA PRESTASI**

LIVE | PODCAST 48 Hours Non Stop #HDKDKumham2021

1.660 > ditonton 124 0 BAGIKAN SIMPAN ...

BAB III PENUTUP

Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan pelayanan informasi publik, petugas diambil dari perwakilan setiap bidang/bagian yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya berdampak pada beban kerja ganda karena petugas pelayanan tentunya memiliki tugas pada bidang/bagian masing-masing yang harus diselesaikan.

2. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelayanan informasi publik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari alat komunikasi maupun kelengkapan sarana di Ruang Layanan, PC, dan lainnya.

Langkah Strategis

Langkah strategis sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan baik dari Sumber Daya Manusia, mekanisme/prosedur layanan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas SDM sebagai Petugas Layanan Informasi Publik;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Ruang Layanan Publik;
3. Upaya peningkatan partisipasi publik dalam Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Inovasi-inovasi Penyebaran Informasi Publik.

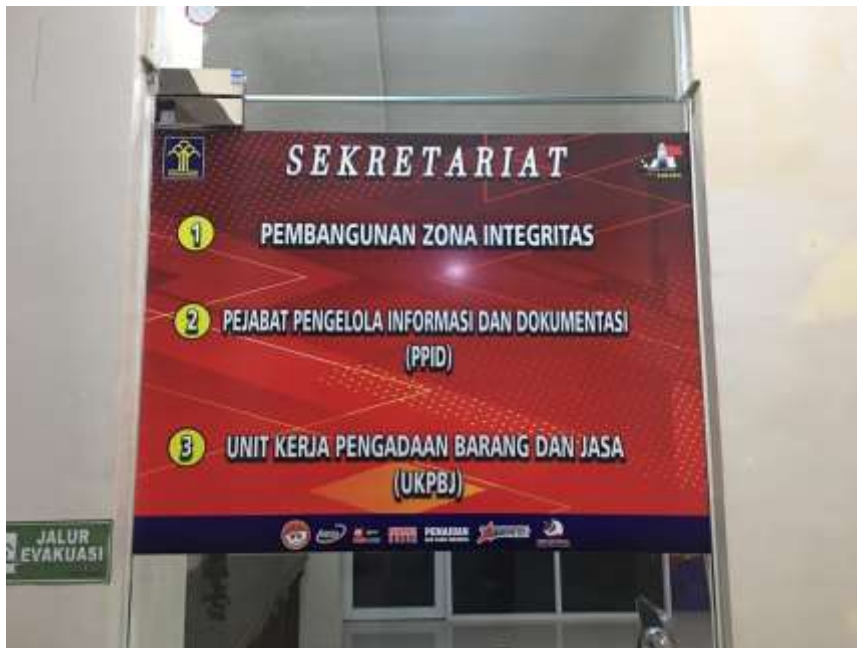
Lampiran-Lampiran



Ruang Permohonan Informasi dan Pengaduan



Ruang Sekretariat PPID



Ruang Permohonan Informasi dan Pengaduan



Maklumat Pelayan





Layanan Informasi Videotron



Petugas Layanan Informasi



Banner Jenis Layanan



Layar Digital Informasi Layanan



Spanduk dan Banner



Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten



**Pelaporan Pengelolaan Informasi Publik
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Triwulan II Tahun 2022**

No.	Permohonan Informasi Publik			Keterangan
	Tanggal	Pemohon	Jenis Informasi	
1.	28 Maret 2022	Amanda Nurhaliza	Informasi Permohonan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
2.	23 Maret 2022	Pascal Caya	Informasi Kunjungan ke Lapas	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
3.	23 Maret 2022	Fransiska	Informasi Sumpah Notaris Pindahan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
4	21 Maret 2022	Unknown	Informasi Izin Penelitian ke Lapas	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
5.	18 Maret 2022	Unknown	Permohonan Informasi Notaris An. Anna Maria	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
6.	17 Maret 2022	Unknown	Informasi Kewarganegaraan Anak	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
7.	17 Maret 2022	Nurul Jamilah	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
8.	16 Maret 2022	Unknown	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
9.	16 Maret 2022	Rafly Darmawan	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
10.	14 Maret 2022	Hetty	Pelaporan Yankomas	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
11.	10 Maret 2022	Unknown	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
12.	07 Maret 2022	Unknown	Legalitas Dokumen	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

13.	01 Maret 2022	Novalia Rahmah	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
14.	23 Februari 2022	Unknown	Permohonan KITAS Investor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
15.	21 Februari 2022	Hany Dwi Syadina	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
16.	16 Februari 2022	Notaris Dewi Tjandraningsih	Informasi Laporan Bulana Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
17.	14 Februari 2022	Selly Filanda	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
18.	14 Februari 2022	Unknown	Informasi PB Narapidana	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
19.	11 Februari 2022	Ninda Karenia	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
20.	10 Februari 2022	Unknown	Informasi Notaris An. Anna Maria	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
21.	10 Februari 2022	Unknown	Informasi Asimilasi Rumah	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
22.	27 Januari 2022	Nunung	Informasi Perseroan Perseorangan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
23.	26 Januari 2022	Unknown	Pengaduan Oknum Narapidana	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
24.	26 Januari 2022	Windy	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
25.	25 Januari 2022	Unknown	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
26.	21 Januari 2022	Dede Radika	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
27.	21 Januari 2022	Unknown	Informasi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor

				Layanan Informasi
28.	19 Januari 2022	Novi	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
29.	19 Januari 2022	Tia	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
30.	13 Januari 2022	Unknown	Informasi Nomor Layanan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
31.	13 Januari 2022	Unknown	Informasi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
32.	13 Januari 2022	Unknown	Informasi Paspor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
33.	13 Januari 2022	Annisa	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
34.	08 Januari 2022	Unknown	Informasi Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
35.	07 Januari 2022	Unknown	Legalisir Dokumen Keimigrasian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
36.	07 Januari 2022	Unknown	Informasi CPNS	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
37.	03 Januari 2022	UT Serang	Informasi Kesiediaan Menjadi Narasumber	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

**Rekap Permohonan Informasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Triwulan II Tahun 2022**

Jumlah Permohonan Informasi	37
Jumlah Pemohon Informasi	37
Jumlah Pengajuan Keberatan	0
Jumlah Sengketa	0